

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D., & Ceacilia Srimindarti. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Retrieved from pancawatihardiningsih@gmail.com,%0Aceaciliasrimindarti@gmail.com
- Am, M. S., Kadir, A. G., & Nurlinah, H. (2010). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah ; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar Muh Shujahri Am (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 37–42. Retrieved from muhshujahri@gmail.com
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473–485.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. (S. Saat, Ed.) (Ketiga). Jakarta 13740: Erlangga. Retrieved from www.erlangga.co.id
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. (S. Saat, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Dan Call for Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, (September).
- Ghazali, R., Fahmi, M., & Katiallo, T. (2018). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin, 3(1), 334–340.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (M. E. Kurnanto, Ed.) (Kesatu). Bandung: Alfabeta, CV. Retrieved from www.cvalfabeta.com
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46.
- Kamaroesid, H. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik /Penerapannya Di Desa* (Edisi Asli). Jakarta: Mitra Wacana Media. Retrieved from <http://www.mitrawacanamedia.com>
- KBBI. (2019a). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved January 25, 2019, from <https://kbbi.web.id/desa>
- KBBI. (2019b). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved January 25, 2019, from <http://kbbi.web.id/laksana>

- Kurniati, P. S. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, III(1), 1–12. Retrieved from poni_sk@yahoo.com
- Kurniawati, A. P. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Akuntansi*, I(1), 360–371. Retrieved from <http://proceedings.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (1945). Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32 (2004). Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 33, 1 (2004). Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 1 (2014). Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Pub. L. No. 113, 1 (2014). Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pub. L. No. 114, 1 (2014). Indonesia.
- Menteri Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pub. L. No. 1, 1 (2015). Jakarta.
- Menteri Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pub. L. No. 19, 1 (2017). Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pub. L. No. 49, 1 (2016). Indonesia.
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Kusmayawati, Ed.) (Kedua). Bogor 16720: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Retrieved from <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>

- Senduro, D. (n.d.). *Rincian Penerimaan Pendapatan Desa Di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015-2017*. Lumajang.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 76–84. Retrieved from Victorytambuwun.7@gmail.com
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>
- Yuliansyah, & Rusmanto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

